



Pembangunan Manusia yang Berkarakter Pancasila Melalui Pendidikan Dasar dan Menengah guna Terwujudnya Masyarakat Indonesia Seutuhnya dalam Rangka Ketahanan Nasional

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 31 ayat (1) mengamanatkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sedangkan pada ayat (3) menegaskan, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dijelaskan pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila melalui pendidikan dasar dan menengah



mendesak dilakukan. Hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan untuk menjadikan manusia dan masyarakat secara utuh, sehingga terwujud masyarakat Pancasila yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan. Pembangunan manusia yang berkarakter Pancasila menjadi isu dan perhatian masyarakat, karena akhir-akhir ini banyak terjadinya tawuran dan kasus kriminalitas, kasus narkoba, bahkan kasus asusila yang dilakukan anak-anak usia sekolah dasar dan menengah.

Terkait dengan hal tersebut sesungguhnya perlu diungkap apa yang menjadi akar masalah melemahnya manusia berkarakter Pancasila, apakah faktor dimensi filosofi pendidikan, materi/kurikulum pendidikan, metode, faktor pendidik, dukungan anggaran, ketersediaan sarana prasarana, *political will* pemerintah, atau faktor eksternal lainnya, baik kondisi nasional, regional maupun global. Selanjutnya bagaimana solusinya untuk memecahkan masalah tersebut melalui kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Salah satu solusinya adalah menjadi prioritas pendidikan saat ini, khususnya pendidikan tingkat dasar dan menengah, karena di usia ini masih bisa diharapkan karakter menjadi baik, jika dapat dilakukan “intervensi dan *treatment*” yang baik dan benar, dapatlah dikatakan disini, bahwa peran pendidikan sangat penting, agar supaya setiap individu Indonesia dimasa yang akan datang menjadi individu andalan. Dapatlah dikatakan disini, bahwa peran

pendidikan sangat penting, agar setiap individu Indonesia dimasa yang akan datang menjadi individu yang handal, pintar dan memiliki karakter Pancasila dalam berkehidupan sebagai bangsa Indonesia dan mampu memasuki kancah persaingan dunia dalam era globalisasi saat ini, tanpa meninggalkan perilaku yang berlandaskan Pancasila.

Negara harus terus berupaya mengangkat derajat dan martabat penduduk, salah satunya adalah meningkatkan pendidikan penduduk tanpa menghilangkan identitas diri sebagai manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila, sehingga dapat menjadikan penduduk yang lebih berkualitas serta memiliki integritas. Berkarakter Pancasila berarti memiliki rasa cinta tanah air dengan diawali menyadari sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, rasa toleransi yang tinggi, semangat kegotong royongan, cinta sesama mahluk, atau dengan perkataan lain berahlak mulia. Oleh karena itu, maka pembangunan manusia yang berkarakter Pancasila harus segera dapat diwujudkan.

Permasalahan

Dalam era keterbukaan, tuntutan akan mutu pendidikan dasar dan menengah semakin tinggi, khususnya dalam peletakan dasar kemampuan berkompetisi dan kemampuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun sampai saat ini, implementasi pendidikan yang berkualitas dan merata masih menghadapi berbagai kendala. Hasil pengukuran Ketahanan Nasional



yang dilakukan oleh Laboratorium Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional RI tahun 2013 menemukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan pendidikan nasional sebagai berikut:

- a. Mengapa pemahaman dan penghayatan akan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila terutama untuk generasi muda yang berpendidikan dasar dan menengah cenderung menurun?
- b. Bagaimana pendidikan nasional yang diharapkan dapat menjadi sarana pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila masih menghadapi masalah, terutama masih rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan nasional?

Analisa

Pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila merupakan salah satu upaya untuk menciptakan SDM potensial yang bertaqwa kepada Tuhan YME, bermoral dan berbudi luhur. Oleh karena itu, ada nilai-nilai yang harus selalu ditanamkan dalam kehidupan sejak usia dini, minimal pada saat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, nilai-nilai tersebut antara lain: kejujuran, ketaatan, gotong royong, peduli dan empati. Nilai-nilai ini adalah merupakan refleksi dari penerapan falsafah Pancasila. Seorang anak didik seharusnya menerapkan pendidikan yang seimbang antara pendidikan keahlian yang

didapat saat melaksanakan pendidikan formal serta pendidikan etika yaitu pembinaan hati nurani secara lebih berimbang, sehingga seseorang akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan demikian, maka pendidikan karakter memegang peran yang penting dalam menyeimbangkan keahlian dan etika serta moral seseorang.

Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan nasional antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya tenaga pendidik yang mumpuni dan dapat mentransfer pengetahuan kepada anak didik serta mampu mensubstansiasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran di sekolah.
- b. Pendidikan di Indonesia masih dilaksanakan secara parsial, yaitu hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja, sedang dimensi afektif dan psikomotorik belum dilaksanakan. Misalnya, pelajaran agama hanya berisi penjelasan/hafalan tentang ajaran agama tertentu, tetapi tidak disertai dengan praktik ajaran agama tersebut dan implementasi dalam kehidupan faktual.
- c. Dalam kehidupan bermasyarakat di sekolah dan dalam proses pembelajaran di kelas, nilai-nilai Pancasila belum secara sadar dan sungguh-sungguh di potensiasikan, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat kecenderungan kurang menghargai kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kebhinnekaan.



Hal ini mengakibatkan terjadinya bibit anarki terhadap keyakinan yang berbeda.

- d. Kurangnya sosok keteladanan sebagai panutan serta maraknya fenomena kekerasan seksual terhadap anak usia sekolah, tawuran antar-pelajar/mahasiswa yang menunjukkan adanya kemerosotan moral, sehingga diperlukan “perbaikan” melalui sistem pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar dan menengah.
- e. Kurangnya infrastruktur, suprastruktur dan sarana prasarana serta tenaga pendidik yang mau bertugas di daerah pedalaman khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

Jika kita teliti lebih jauh satu demi satu berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, maka sudah seharusnya kita memberikan prioritas bagi pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila, agar peradaban bangsa Indonesia tidak hancur, sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari, setelah anak menjadi dewasa dan berperilaku tidak baik. Pendidikan sejak masa sekolah dasar dan menengah menjadi andalan dalam pembentukan karakter yang baik. Hal ini sangat urgensi pembangunan (kembali) karakter bangsa yang berlandaskan 4 (empat) konsensus bangsa yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Upaya

Arah kebijakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkarakter Pancasila adalah menjadikan

setiap individu Indonesia memiliki karakter Pancasila melalui pendidikan Pancasila, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang strategis yaitu mengutamakan kepentingan nasional. UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa Kepentingan Nasional haruslah diutamakan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya setiap individu khususnya yang berada pada usia sekolah, hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk bersekolah. Dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila perlu dilakukan berbagai upaya antara lain :

a. Mengutamakan Kepentingan Nasional

Melakukan sosialisasi yang berkesinambungan tentang kepentingan nasional, sehingga setiap elemen masyarakat menyadari, bahwa kepentingan nasional adalah diatas kepentingan pribadi dan golongan. Kepentingan nasional merupakan prioritas, setiap kegiatan yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta harus melalui kajian yang serius dan mengutamakan kepentingan nasional, sehingga kegiatan yang merugikan kepentingan nasional, harus dihentikan secara berani dan tegas, tidak ada toleransi dan terbuka secara nasional, agar masyarakat mengetahuinya dan dapat diambil langkah-langkah yang benar.

b. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila

Dunia pendidikan merupakan media yang paling efektif dalam menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila, karena dunia pendidikan merupakan konstruksi dunia nyata dalam komunitas



terbatas. Dalam hal ini, apa yang terjadi di dunia luar, dalam dunia pendidikan (biasanya diwakili oleh sekolah), terjadi interaksi inter dan sekaligus intra personal di dalamnya. Dalam interaksi orang per orang perlu memiliki nilai-nilai tertentu yang disepakati dan dihormati bersama. Oleh karena itu, dalam penerapan nilai-nilai dalam segala sendi kehidupan seperti dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural dapat dikelompokkan dalam : **Olah Hati** (*Spiritual and Emotional Development*), **Olah Pikir** (*Intellectual Development*), **Olah Raga dan Kinestetik** (*Physical and Kinesthetic Development*) serta **Olah Rasa dan Karsa** (*Affective and Creativity Development*), dengan “aturan main” yang telah disepakati dan dihormati bersama yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa. Potensiasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran di kelas memerlukan pengelompokan yang akan sangat berguna, yaitu : proses *intervensi* (pembelajaran, pemodelan dan penguatan) dan proses *habitulasi* (penguasaan, pembiasaan dan penguatan) yang bermuara menjadi karakter. Melalui proses internalisasi dan personalisasi pada diri anak didik akan menjadikan anak didik yang berkarakter Pancasila.

Setiap siswa didik mendapat pengajaran Pancasila dalam sekolah, maka perlu dilakukan hal-hal yang secara langsung dapat mengimplementasikan pendidikan tersebut dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.

Diadakan program yang sifatnya mempersatukan seluruh siswa dalam keberagaman agama yang dianut. Memberikan kesempatan kepada anak-anak mengikuti suatu program seminar di sekolah, dengan narasumber para pemuka agama dari berbagai agama, mendengarkan substansi dari berbagai agama dan mengarahkan, agar para peserta didik saling menghormati, saling menghargai dan saling mencintai satu sama lain meskipun beragam agama yang dianut.

Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila pada awalnya ditanamkan ke dalam diri masing-masing individu, kemudian nilai-nilai yang sudah mengkristal dalam diri anak didik dituangkan kembali dalam perbuatannya, diimplementasikan melalui proses penguatan konsep ke dalam bentuk perbuatan (*transforming concepts into action*) yang sangat sesuai dengan ciri-ciri karakteristik anak didik pendidikan dasar dan menengah. Menurut Piaget Tahapan Operasional Formal adalah: “Tahapan dimana anak didik sudah mulai berpikir abstrak dan mampu berhipotesis, mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, serta mampu berpikir secara sistematis untuk memecahkan masalah”.

Pancasila sebagai landasan cita-cita nasional seharusnya selalu digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan dalam memecahkan berbagai permasalahan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keutuhan sila Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat dijadikan



pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, domestik, regional maupun global. Pancasila menjadi landasan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak seseorang di masa mendatang yang dimulai dari pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah.

c. Mendorong agar kualitas anak didik meningkat

Setiap individu terutama dalam usia sekolah dasar dan menengah hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan. Pendidikan dimaksud adalah pendidikan yang memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat menghasilkan manusia Indonesia unggulan. Akan tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana menciptakan manusia Indonesia yang pintar dan cerdas, namun tidak meninggalkan perilaku atau karakter yang baik, karakter Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

Sekolah sebagai tempat pendidikan hendaknya memiliki standar yang baku, sehingga kualitas dari semua sekolah memiliki kesamaan, dengan fasilitas yang juga memadai, sehingga anak didik dapat melaksanakan program belajar dengan baik, tanpa harus bersaing dalam memilih sekolah. Untuk itu, mutu semua sekolah harus diperhatikan sehinggamemiliki kualitas yang baik. Sarana dan prasarana yang memadai juga harus tersedia, sehingga anak didik dapat belajar dengan baik.

Dalam membentuk karakter yang baik pada anak didik, tenaga pendidik

harus mampu menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada anak didik secara terus menerus tentang berbagai nilai baik dan buruk. Usaha ini bisa dibarengi pula dengan langkah-langkah : memberi penghargaan (*prizing*) dan menumbuhsuburkan (*cherising*) nilai-nilai baik dan sebaliknya mengecam dan mencegah (*discouraging*) nilai-nilai buruk; menegaskan nilai baik dan buruk secara terbuka dan kontinu; memberikan kesempatan kepada anak didik memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan berdasarkan nilai; melakukan pilihan secara bebas setelah menimbang dalam-dalam berbagai konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan; membiasakan bersikap dan bertindak atas niat dan prasangka baik (*husnudzon*) dan tujuan ideal; membiasakan bersikap dan bertindak dengan pola-pola baik yang diulangi terus menerus dan konsisten. Pendidikan karakter Pancasila selain harus diselenggarakan melalui lembaga pendidikan, mesti pula melibatkan semua pihak; rumahtangga dan keluarga serta lingkungan sekolah maupun keluarga lebih luas (masyarakat). Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyambung kembali hubungan dan *educational networks*. Dengan demikian diharapkan anak didik di masa depan menjadi manusia Indonesia seutuhnya dengan karakter yang baik berlandaskan Pancasila.

d. Pemerintah Pusat dan Daerah harus mengambil tanggung jawab dalam Pendidikan di wilayahnya



Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab menjadikan pendidikan sebagai salah satu program prioritas yang harus dikawal untuk keberhasilannya antara lain :

- 1) **Menteri Pendidikan dan Kebudayaan** menetapkan target muatan materi pendidikan berkarakter bangsa serta tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat nasional.
- 2) **Pemerintah dan pemerintah daerah** mengalokasikan anggaran pendidikan, agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- 3) **Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga** terkait dalam menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik, orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/ atau peserta didik di daerah khusus.
- 4) **Pemerintah** melakukan dan/ atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan Setiap lembaga pendidikan

harus dapat berkompetisi secara sehat untuk menjadikan generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak mulia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah haruslah selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan yang telah dilakukan dalam wilayah tanggung jawabnya.

e. **Tenaga Pendidik yang Berkualitas**

Hendaknya terus dikembangkan kemampuan tenaga pendidik, karena salah satu kunci keberhasilan pendidikan adalah bagaimana tenaga pendidikan yang berkualitas dapat mentransfer *knowledge* kepada anak didiknya. Selain itu tenaga pendidik juga perlu di *upgrade* untuk meningkatkan kemampuan diri, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, selalu menyadari dan peka terhadap situasi dan kondisi serta perubahan yang sangat cepat, dengan tetap meningkatkan moral, agar dapat menjadi teladan bagi anak didik. Setiap guru dan tenaga kependidikan lain di lingkungan sekolah hendaklah mampu menjadi "*uswah hasanah*" yang hidup (*living exemplary*) bagi setiap peserta didik.

Tenaga pendidik haruslah menyadari tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan baik, menyayangi dan mencintai anak didiknya, dengan sikap yang lemah lembut, sabardan tidak bersikap kasar, sehingga seorang anak didik merasa termotivasi untuk terus belajar menuntut ilmu, tanpa rasa enggan dan takut.



f. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 yang segera akan diimplementasikan, haruslah senantiasa disosialisasikan, sehingga masyarakat siap untuk mendukung keberhasilan kurikulum baru ini. Finansial dalam mendukung pelaksanaan kurikulum 2013 ini hendaknya tersedia secara memadai, sehingga tidak sulit dan tidak ada alasan untuk menunda dan diharapkan dengan kesiapan dalam berbagai segi akan membawa keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 dan generasi Indonesia mendatang siap dalam menghadapi masa depan yang lebih baik.

Kurikulum 2013 yang memuat “cara” yang lebih tepat untuk menjadikan anak didik lebih pintar tanpa meninggalkan pola perilaku manusia Indonesia, diharapkan substansi yang terkandung dalam kurikulum ini benar-benar memenuhi kebutuhan pendidikan dalam upaya menjadikan manusia Indonesia yang cerdas dan berakhlak mulia di masa mendatang.

Kesimpulan

Dari analisis kondisi saat ini dan kebutuhan dimasa mendatang dapat disimpulkan beberapa hal:

- a. Merubah paradigma pendidikan dasar menjadi lebih integratif, dengan pendidikan terpadu diharapkan akan dapat mengantarkan kepada pendidikan lebih bermakna dan bermanfaat serta akan memberikan dampak kepada terbentuknya jati diri/ karakter masyarakat Indonesia yang sebenarnya.
- b. Pembangunan karakter bangsa memang harus dimulai dari membangun individu masyarakat Indonesia secara berkesinambungan dan terus-menerus, membangun karakter tidak bisa dilakukan secara cepat dan instan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional.
- c. Sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, maka pendidikan adalah hal yang penting. Namun pendidikan disini bukan hanya menjadikan manusia Indonesia yang canggih dalam teknologi karena kemampuannya yang baik hasil dari pendidikan saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjadikan manusia Indonesia berkarakter yang baik pula, sesuai falsafah Pancasila, sehingga membangun manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila. Tujuan pendidikan sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu menghasilkan insan cerdas yang kompetitif yang memiliki 3 kompetensi (ASK) yaitu Kompetensi Attitude (sikap), Kompetensi *Skill* (ketrampilan), Kompetensi *Knowledge* (ilmu pengetahuan).
- d. Lembaga pendidikan harus menciptakan peserta didik yang punya jiwa Pancasila, akhlak yang baik (beriman, jujur dan santun), mandiri, kreatif, inovatif dan gemar menuntut ilmu serta mengembangkannya maupun cinta tanah air. Untuk menjadikan



- manusia Indonesia dengan kriteria pintar dan berkarakter baik, maka peletakan dasar pada pendidikan tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah harus menjadi prioritas.
- e. Pendidikan 9 s.d 12 tahun hendaknya benar-benar dapat menjangkau seluruh wilayah tanah air secara adil dan merata. Pancasila agar benar-benar dapat dimasukkan sebagai bagian yang penting dalam pendidikan dasar dan menengah melalui berbagai mata pelajaran yang terkait, sehingga setiap anak didik pada tingkat sekolah dasar dan menengah dapat mengerti, memahami serta mampu mengimplementasikan dalam perilaku sehari-hari.
 - f. Para *stakeholders* harus secara bersama-sama bergandeng tangan untuk mempersiapkan generasi mendatang melalui pendidikan yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik pula serta berkarakter Pancasila.
 - g. Kurikulum 2013 yang segera akan diimplementasikan, hendaknya benar-benar dapat diaplikasikan, dimengerti, dipahami serta menjadi *basic* dalam proses belajar mengajar, agar tidak menjadikan perdebatan yang berkepanjangan, oleh sebab itu sosialisasi kurikulum baru ini hendaknya dapat dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan serta pejabat terkait dapat memberikan informasi yang akurat pada masyarakat luas.
 - h. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka berbagai kendala dan hambatan yang mungkin terjadi perlu diantisipasi dan bagaimana solusinya, terhadap berbagai hal, antara lain :
 - 1) Mempersiapkan legislasi yang mendukung dan melandasi pengimplementasian kurikulum 2013 bagi pendidikan dasar dan menengah.
 - 2) Menciptakan para tenaga didik yang kompeten.
 - 3) Advokasi serta sosialisasi program-program pendidikan secara tepat.
 - 4) Mempersiapkan sarana prasarana pendukung kelancaran program-program pendidikan serta dukungan infra dan suprastruktur bagi pelaksanaan belajar mengajar yang merata diseluruh tanah air.
 - 5) Mempersiapkan dana pendukung yang memadai

Saran/Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, perlu disampaikan beberapa rekomendasi sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila melalui Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain:

- a. Perlu dilakukan perubahan paradigma sistem pendidikan nasional yang ideal, pada pendidikan dasar dan menengah pada tataran nasional maupun pada tataran satuan pendidikan, sehingga mampu membangun manusia yang



berkarakter Pancasila. Sekolah bukan sekedar tempat *transfer of knowledge* serta menciptakan masyarakat terpelajar (*educated people*) saja, tetapi juga mengusahakan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (*value-oriented enterprise*) serta menjadi *living exemplary* untuk mengontrol pola perkembangan kebudayaan dan peradaban. Wajib belajar 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) tahun sebagai *formative years* adalah waktu untuk membentuk karakter. Dengan hakikat pendidikan serta metodologi yang tepat dalam mengajarkan nilai, sikap dan perilaku, maka pada usia tersebut diharapkan dapat dibangun *intellectual curiosity* dan *common sense* yang melekat dalam diri manusia, sebagai bekal kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

- b. Perlu dilakukan penguatan substansi sistem pendidikan dasar dan menengah sebagai proses harus juga berupa pendidikan seutuhnya yaitu pendidikan sebagai proses komprehensif yang mencakup ketiga aspek dari kompetensi pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hal ini dapat dilakukan dengan mensubstansiasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran di sekolah, melalui proses internalisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga mengkristal dalam diri anak didik dan dituangkan kembali dalam perbuatan nyata (*transforming concepts into action*). Dapat dikatakan, bila seseorang

telah dapat menginternalisasi nilai-nilai substansiasi Pancasila dalam kehidupan nyata, maka dengan sendirinya orang tersebut telah berkontribusi memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia. Jadi, semakin banyak orang Indonesia berkontribusi memperkuat Ketahanan Nasional, maka Ketahanan Nasional Indonesia menjadi semakin kuat. Menurut Friedman (2005) bahwa *Critical Mass of Quality* (CMQ) adalah syarat efektivitas dalam dunia yang datar dan yang mendatarkan dunia. Di dunia yang datar, ketika *kuantitas* dihubungkan dengan *kualitas* dalam suatu kegiatan dan dalam perencanaan strategis, maka *kuantitas* menjelma menjadi *critical mass* untuk menjadi signifikan dan mengimbangi nilai *kualitas*. Kuantitas dan kualitas adalah dua dimensi dari satu realitas yang utuh, apabila salah satu tidak ada, maka realitas itu akan terdistorsi, menjadi tidak sah atau hilang. Pemahaman hubungan antara kuantitas dan kualitas sangat krusial serta menentukan kinerja, apabila terlampau menekankan yang satu terpisah dari yang lain, selama itu hasilnya akan tetap *inefektif*. Hal ini berarti, bahwa kualitas itu inheren dalam kuantitas yang *massif*. Untuk itu, dunia pendidikan baik formal, informal dan non formal adalah tempat yang tepat untuk menyemai bibit *Critical Mass of Quality* (CMQ) dalam rangka Ketahanan Nasional.



- c. Perlu dilakukan Pembinaan kompetensi profesional guru dan calon guru dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas.
- d. Perlu kewaspadaan dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah internasional yang justru telah melaksanakan pendidikanseutuhnya (komprehensif) yang mengintegrasikan dimensi meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap, tetapi kurang membekali siswa dengan pendidikan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan lebih mengutamakan pendidikan karakter global yang bernuansa liberal dan kapitalis. Jika tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah internasional, tersebut dikhawatirkan satu generasi Indonesia ke depan akan dikuasai dan dipimpin oleh lulusan/*output* sekolah-sekolah internasional yang memang lebih unggul dalam kualitas akademik dan keterampilan manajerial tetapi lemah dalam karakter dan wawasan kebangsaan.
- e. Diperlukan model atau acuan yang dapat diteladani oleh siswa melalui pendekatan *modelling* atau *exemplary*, yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan menegakkan nilai akhlak, budi pekerti dan moral yang benar melalui model atau teladan. Setiap guru dan tenaga kependidikan lain di lingkungan sekolah hendaklah mampu menjadi model *living exemplary* bagi setiap peserta didik.
- f. Perlu adanya wacana *Civic Intelligence: civic rights dan responsibility*; sebagai alat ukur pemahaman anak didik Indonesia sebagai warga negara Indonesia. *Civil Intelligence* tumbuh dan berkembang dalam budaya lokal, sebagai bingkai Ke-Indonesiaan dan seterusnya dikembangkan sebagai bingkai global. *Civic Intelligence* diharapkan akan memampukan anak didik Indonesia sebagai warganegara mengerti tentang hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga mampu membedakan konsep benar/salah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mudah diadu domba.



Pembangunan Pancasila yang Berkarakter Pancasila Melalui Pendidikan Dasar dan Menengah guna Terwujudnya Masyarakat Indonesia Seutuhnya dalam Rangka Ketahanan Nasional

Focus Group Discussion Kajian Aktual

Pada Rabu, 13 Februari 2013

Pembicara

1. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Cendekiawan Muslim
2. Dr. Bambang Indriyanto, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Prof. Dr. Theresia K. Brahim, Ketua Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta

Penanggung

1. Dr. Fx. Mudji Sutrisno, Budayawan/Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Universitas Driyarkara/Dosen Ahli Kebudayaan Pasca Sarjana UI
2. DR. Anhar Gonggong, Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI
3. Prof. Dr. Sudaryono, SU., Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sosbud Lemhannas RI
4. DR. M. Abduhzen, M.Hum., Direktur Eksekutif *Institute for Education Reform* (IER) Universitas Paramadina

Roundtable Discussion Kajian Aktual

Pada Kamis, 4 April 2013

Pembicara

1. Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, M.S, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Kemendikbud RI.
2. Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA, Anggota Dewan Pengarah Lemhannas RI.
3. Bapak Bambang Wisudo, Direktur Eksekutif Sekolah Tanpa Batas

Penanggung

1. Dr. Yudi Latif, Direktur Eksekutif Reform Institute
2. Bapak Ahmad Rizali, Ketua Dewan Pembina The Centre for The Betterment of Education (CBE)
3. Prof. Dr. Theresia K. Brahim, Ketua Program Studi Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

4. Dr. Adi Sujatno, Bc IP, SH, MH, Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan Nasional Lemhannas RI

Tim Kerja Kajian Aktual

1. Drs. Herry Haryanto, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI
2. Dr. Ratnasari Azahari, MPA, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Lemhannas RI
3. Drs. Alpiner Sinaga, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI
4. Drs. Cosmas Lembang, Dirjen Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI
5. Asis Wanto, Dirjen Ekonomi Debidjianstrat Lemhannas RI
6. Dicky Yuniarto, Dirtap Taplai, Kons dan Sisnas Debidtaplai Kebangsaan Lemhannas RI
7. Sulistyanto, M.Sc., Karo Kerma Settama Lemhannas RI
8. Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si., Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Diplomasia Lemhannas RI
9. Emmy Irma Simanjuntak, S.H., M.Sc., Kasubdit Sosial Ditjian Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI
10. Bambang Sigit S, M.Sc., Kasubdit Ilpengtek Ditjian Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI
11. Suhartono, SKM, BE., Kasubdit Ilpengtek Ditjian Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI
12. Drs. C. B. Mujiyanto, M.Sc., Ksi Evpor Subdit Budaya & Ilpengtek Ditjian Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI
13. Linda Purnamasari, S.Sos., Kasubbag Protokol Bag Prot & Dok Rohumas Lemhannas RI
14. Yuningtyasih, Bati Adm Subag Anev Progar Bag Dalgar Roren & Ku Settama Lemhannas RI
15. Shinta Tri Lestari, S.H., Pemroses Administrasi Subdit Ilpengtek Ditjian Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI